

Analisis Implementasi Kebijakan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Di Kalangan Remaja Kota Bandar Lampung (Studi SMA Negeri 15 Bandar Lampung)

Andre Pernanda¹, Malik², Ida Farida³

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Januari 1, 2026

Revised Januari 2, 2026

Accepted Januari 8, 2026

Kata Kunci:

Implementasi Kebijakan,
P4GN,
Penyalahgunaan Narkoba,
Remaja,
Sekolah

Keywords:

Policy Implementation,
P4GN,
Drug Abuse,
Adolescents,
Schools

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja masih menjadi permasalahan serius di Kota Bandar Lampung. Pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) melaksanakan kebijakan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sebagai upaya pencegahan di lingkungan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan P4GN di kalangan remaja dengan studi pada SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis implementasi kebijakan mengacu pada model Edward III yang meliputi dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan P4GN telah dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, kampanye bahaya narkoba, serta pembentukan relawan anti narkoba. Namun, implementasinya belum berjalan optimal. Metode komunikasi masih bersifat satu arah dan kurang menarik bagi siswa. Keterbatasan sumber daya dan waktu pelaksanaan menjadi kendala keberlanjutan program. Selain itu, koordinasi lintas sektor belum maksimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan efektivitas implementasi kebijakan P4GN memerlukan penguatan komunikasi partisipatif, dukungan sumber daya yang memadai, serta koordinasi yang berkelanjutan.

ABSTRACT

Drug abuse among adolescents remains a serious problem in Bandar Lampung City. The government, through the National Narcotics Agency (BNN), implements the Prevention, Eradication, Abuse, and Illicit Trafficking of Drugs (P4GN) policy as a preventative measure in educational settings. This study aims to analyze the implementation of the P4GN policy among adolescents, studying at SMA Negeri 15 Bandar Lampung. The study used a descriptive qualitative approach with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The analysis of policy implementation refers to the Edward III model, which includes the dimensions of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results show that the P4GN policy has been implemented through socialization activities, counseling, drug danger campaigns, and the formation of anti-drug volunteers. However, its implementation has not been optimal. The communication method is still one-way and less attractive to students. Limited resources and implementation time are obstacles to the sustainability of the program. In addition, cross-sector coordination is not optimal. This study concludes that increasing the effectiveness of the P4GN policy implementation requires strengthening participatory communication, adequate resource support, and ongoing coordination.



Corresponding Author:

Andre Pernanda
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bandar Lampung
Lampung, Indonesia
Email: andre.22111023@student.ubl.ac.id

1. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan serius yang mengancam ketahanan nasional dan keberlangsungan generasi muda di Indonesia. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga Indonesia berpotensi menjadi sasaran sekaligus jalur distribusi narkotika ilegal. Hampir seluruh wilayah di Indonesia terlibat dalam permasalahan ini, menjadikan narkoba sebagai ancaman nyata bagi kehidupan sosial masyarakat Hariyanto, 2018 dalam. Peredaran narkoba umumnya dilakukan secara terorganisasi dan melibatkan jaringan tersembunyi. Penyalahgunaan narkoba didefinisikan sebagai penggunaan zat terlarang yang tidak diperuntukkan bagi tujuan medis, melainkan untuk memperoleh efek tertentu yang bersifat adiktif [1]

Penyalahgunaan narkotika tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga kejahatan sosial yang menimbulkan dampak berkelanjutan terhadap masyarakat dan generasi penerus bangsa [2]. Untuk merespons kondisi tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab dalam penanganan narkotika.

Pelaksanaan kebijakan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) didukung oleh kerangka regulasi yang kuat, mulai dari Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN 2020–2024, hingga Rencana Aksi Nasional P4GN 2025–2029. Di tingkat daerah, Provinsi Lampung mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2019 sebagai dasar pelaksanaan kebijakan P4GN, khususnya di lingkungan pendidikan melalui Keputusan Kepala BNN Nomor 188/K/VI/2022/BNN.

Remaja merupakan kelompok usia yang paling rentan terhadap penyalahgunaan narkotika. Hasil Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023 yang dilakukan oleh BNN, BRIN, dan BPS menunjukkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih tergolong tinggi, terutama pada kelompok usia produktif. Data prevalensi tersebut disajikan pada Tabel 1 berikut.

Table 1. 1 Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba

	Prevalensi (%)			Estimasi Penduduk Indonesia Berumur 15-64 tahun Terpapar Narkoba (Ribuan Jiwa)			Persentase Penduduk Berumur 15-64 tahun Terpapar Narkoba	Perubahan Indonesia
	2019	2021	2023	2019	2021	2023	2019-2021	2021-2023
Setahun Pakai	1,80	1,95	1,73	3.419	3.662	3.337	8,33	-11,28
Pernah Pakai	2,40	2,47	2,20	4.534	4.827	4.244	2,92	-10,93

Meskipun secara nasional prevalensi menunjukkan penurunan pada tahun 2023, survei tersebut mencatat bahwa kelompok usia 15–24 tahun justru mengalami peningkatan sebesar 0,01 poin. Hal ini menegaskan bahwa remaja merupakan kelompok paling rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Provinsi Lampung menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan narkoba yang tinggi dan menempati peringkat ketiga nasional dengan 859 kawasan rawan narkoba (PPID BNN RI, 2024). Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi, tingginya angka pengangguran, ketimpangan ekonomi, serta posisi geografis Lampung sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera yang strategis bagi peredaran narkoba.

Data Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung menunjukkan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Kota Bandar Lampung masih berfluktuasi dan belum dapat ditekan secara konsisten, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.

Table 2. Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkoba Oleh Remaja Kota Bandar Lampung

No	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah Kasus
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	2022	415	24	439
2.	2023	223	7	230
3.	2024	257	33	290
4.	2025	120	8	128

Data tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja masih didominasi oleh laki-laki dengan persentase lebih dari 85% dari total kasus. Meskipun terjadi penurunan pada tahun tertentu, fluktuasi kasus mengindikasikan bahwa upaya pencegahan belum sepenuhnya berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.

Dalam konteks pendidikan, kebijakan P4GN dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan, pembentukan relawan anti narkoba, serta kampanye sadar narkoba di sekolah. SMA Negeri 15 Bandar Lampung merupakan salah satu sekolah mitra BNN Provinsi Lampung yang aktif dalam pelaksanaan program tersebut. Namun, berdasarkan survei awal, masih terdapat siswa yang mengikuti kegiatan P4GN sebatas formalitas dan belum memiliki pemahaman mendalam mengenai bahaya narkoba. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap implementasi kebijakan P4GN di lingkungan sekolah [3].

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di kalangan remaja Kota Bandar Lampung dengan studi pada SMA Negeri 15 Bandar Lampung.

2. METODE

Pada studi ini, peneliti menerapkan jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena secara mendalam dan apa adanya berdasarkan kondisi alamiah, dengan data penelitian berupa kata-kata, tindakan, dan dokumen, serta hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian naratif tanpa menggunakan analisis statistik (Sugiyono, 2021). Metode ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di kalangan remaja.

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung dan SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada peran strategis BNN Provinsi Lampung sebagai pelaksana kebijakan P4GN di tingkat daerah serta SMA Negeri 15 Bandar Lampung sebagai sekolah mitra BNN dalam pelaksanaan program P4GN. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi kebijakan P4GN meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dari data primer yang diperoleh secara langsung dari narasumber yang terlibat dalam pelaksanaan program P4GN, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi, laporan kegiatan, peraturan perundang-undangan, dan data statistik terkait P4GN (Sugiyono, 2021).

Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, dengan menggunakan instrumen pendukung berupa panduan wawancara, alat perekam, serta buku catatan untuk memastikan data yang diperoleh relevan dengan fokus penelitian.

Analisis data menggunakan tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman 1994 dalam [4]. Pada tahapan keabsahan data, peneliti menggunakan uji keabsahan data melalui teknik triangulasi, yaitu proses pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber, metode, dan waktu untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas data penelitian [4].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di kalangan remaja Kota Bandar Lampung, khususnya di SMA Negeri 15 Bandar Lampung, telah dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung melalui berbagai program pencegahan. Program tersebut meliputi kegiatan sosialisasi, penyuluhan bahaya narkoba, kampanye hidup sehat, serta pembentukan relawan anti narkoba di lingkungan sekolah. Pelaksanaan kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba [5].

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan P4GN belum sepenuhnya berjalan optimal. Beberapa siswa masih memandang kegiatan P4GN sebagai kegiatan seremonial dan belum sepenuhnya memahami substansi serta dampak jangka panjang penyalahgunaan narkoba. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan hasil yang dicapai di tingkat pelaksana dan sasaran kebijakan.

1. Dimensi Komunikasi

Pada dimensi komunikasi, BNN Provinsi Lampung telah menyampaikan informasi kebijakan P4GN melalui kegiatan sosialisasi langsung ke sekolah, penggunaan media cetak dan media sosial, serta koordinasi dengan pihak sekolah. Informasi yang disampaikan umumnya mencakup jenis-jenis narkoba, dampak penyalahgunaan, serta sanksi hukum bagi pelanggar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pesan kebijakan telah disampaikan secara jelas kepada pihak sekolah dan siswa [6].

Namun yang di temukan di lapangan efektivitas komunikasi masih terbatas karena metode penyampaian yang cenderung satu arah dan monoton. Hal ini menyebabkan sebagian siswa kurang tertarik dan cepat merasa bosan selama kegiatan berlangsung. Temuan ini sejalan dengan pendapat Edward III (1980) yang menyatakan bahwa komunikasi kebijakan tidak hanya harus jelas, tetapi juga konsisten dan dapat dipahami oleh kelompok sasaran agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal [7].

2. Dimensi Sumber Daya

Pada dimensi sumber daya, BNN Provinsi Lampung telah memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam pelaksanaan kebijakan P4GN, khususnya pada bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M). Selain itu, dukungan anggaran dan sarana prasarana dasar telah tersedia untuk mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di sekolah (Lestari et al., 2022). Meskipun demikian,

keterbatasan jumlah personel dan waktu pelaksanaan kegiatan menjadi kendala utama. Kegiatan P4GN di sekolah belum dapat dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan karena keterbatasan sumber daya tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya belum sepenuhnya sebanding dengan luasnya cakupan wilayah dan sasaran kebijakan, sebagaimana dikemukakan oleh Edward III (1980) bahwa sumber daya merupakan faktor krusial dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan [9].

3. Dimensi Disposisi (Sikap Pelaksana)

Pada dimensi disposisi, sikap dan komitmen pelaksana kebijakan P4GN, baik dari pihak BNN Provinsi Lampung maupun sekolah, tergolong cukup baik. Pelaksana menunjukkan keseriusan dalam menjalankan tugas serta memiliki pemahaman terhadap tujuan kebijakan P4GN. Guru pendamping dan pihak sekolah juga mendukung pelaksanaan kegiatan dengan memfasilitasi sarana dan mengoordinasikan siswa (Yuanita et al., 2024). Namun, tingkat partisipasi aktif siswa masih relatif rendah. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkat pemahaman, minat, serta latar belakang siswa. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pelaksana memiliki sikap positif terhadap kebijakan, keberhasilan implementasi tetap dipengaruhi oleh respons dan keterlibatan kelompok sasaran [11].

4. Dimensi Struktur Birokrasi

Pada dimensi struktur birokrasi, pelaksanaan kebijakan P4GN telah memiliki dasar hukum dan pedoman kerja yang jelas, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. BNN Provinsi Lampung menjalankan kebijakan berdasarkan instruksi dan regulasi yang telah ditetapkan, serta berkoordinasi dengan pihak sekolah sebagai mitra pelaksana (Putra & Astika, 2023). Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor belum sepenuhnya berjalan optimal. Pelaksanaan kegiatan P4GN masih didominasi oleh BNN, sementara keterlibatan instansi lain dan masyarakat belum maksimal. Kondisi ini berdampak pada keberlanjutan program P4GN di sekolah. Temuan ini sejalan dengan Edward III (1980) yang menekankan bahwa struktur birokrasi yang efektif membutuhkan pembagian tugas yang jelas serta koordinasi yang kuat antar pelaksana kebijakan [13].

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di kalangan remaja Kota Bandar Lampung, khususnya di SMA Negeri 15 Bandar Lampung, telah dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung melalui berbagai kegiatan pencegahan. Pelaksanaan kebijakan tersebut mencakup sosialisasi, penyuluhan, dan kampanye bahaya narkoba yang bertujuan meningkatkan pemahaman serta kesadaran siswa terhadap dampak penyalahgunaan narkoba.

Namun implementasi kebijakan P4GN belum sepenuhnya berjalan optimal. Pada dimensi komunikasi, metode penyampaian informasi masih bersifat satu arah sehingga kurang menarik bagi siswa. Pada dimensi sumber daya, keterbatasan jumlah personel dan waktu pelaksanaan menyebabkan kegiatan P4GN belum dilakukan secara berkelanjutan. Pada dimensi disposisi, pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen yang cukup baik, tetapi partisipasi aktif siswa masih relatif rendah. Sementara itu, pada dimensi struktur birokrasi, koordinasi lintas sektor belum berjalan maksimal sehingga keberlanjutan program P4GN di lingkungan sekolah masih bergantung pada BNN sebagai pelaksana utama. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan P4GN dipengaruhi oleh keterpaduan keempat dimensi implementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Edward III.

REFERENSI

- [1] S. M. Arnela Nurmalita, "Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4gn) Sebagai Rekayasa Sosial Dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Surabaya," *Irpia : Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan*, hal. 16–25, 2023, doi: 10.71040/irpia.v8i5.201.

- [2] P. Singh, Vasu Singh, dan Satendra Pal, "Drug abuse effect on health and society," *Journal of Ayurveda and Integrated Medical Sciences*, vol. 10, no. 6, hal. 160–166, 2025, doi: 10.21760/jaims.10.6.22.
- [3] D. Purnamasari, S. Anggella, M. S. Saputra, dan D. Hulmansyah, "Penyalahgunaan Narkoba Bagi Kalangan Remaja," *Awal Bros Journal of Community Development*, vol. 5, no. 2, hal. 21–24, 2024, doi: 10.54973/abjcd.v5i2.575.
- [4] D. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. 2023.
- [5] S. Riski dan D. Warganegara, "Policy Implementation of BNN Province Lampung in Program Prevention to Eradicate Abuse and Illegal Circulation of Narcotic (P4GN) during the Covid-19 Pandemic," *Proceedings of the Universitas Lampung International Conference on Social Sciences (ULICoSS 2021)*, vol. 628, 2022, doi: 10.2991/assehr.k.220102.077.
- [6] I. Irayanti *et al.*, "Sosialisasi pencegahan narkoba untuk menumbuhkan kesadaran, mencegah bahaya dan merawat masa depan bangsa," *Vivabio: Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, vol. 6, no. 2, hal. 84–96, 2024, doi: 10.35799/vivabio.v6i2.54369.
- [7] P. A. W. Putri dan S. W. Sri, "Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kabupaten Nganjuk," *Journal Publicuho*, vol. 7, no. 2, hal. 579–590, 2024, doi: 10.35817/publicuho.v7i2.394.
- [8] D. Nur Lestari, O. Supriadi, dan H. Waseh, "Implementation of Policy for Prevention and Eradication of Abuse and Illegal Circulation of Drugs and Precursors (P4GN) at The National Narcotics Agency of Tangerang City Rehabilitation Section," *International Journal of Social Sciences Review*, vol. 3, no. 2, hal. 53–65, 2022, doi: 10.57266/ijssr.v3i2.92.
- [9] J. Simamora dan R. S. M. Sihombing, "Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Dan Memberantas Peredaran Narkoba Di Kota Tanjungbalai," *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, vol. 10, no. 1, 2023, doi: 10.37676/professional.v10i1.3519.
- [10] Eva Fitri Yuanita, Mala Sondang Silitonga, dan Hamka, "Analisis Implementasi Kebijakan Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia," *Journal Publicuho*, vol. 7, no. 2, hal. 737–756, 2024, doi: 10.35817/publicuho.v7i2.429.
- [11] D. Soelistya, R. A. Santoso, A. Akhsin, dan T. Triasmono, "The Importance of Guidance and Motivational Encouragement: The Significance of Leadership and Communication in Organizational Management," *Kontribusi: Research Dissemination for Community Development*, vol. 6, no. 2, hal. 194, 2023, doi: 10.30587/kontribusi.v6i2.5929.
- [12] B. Mandala Putra dan C. Astika, "Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika) bidang Pencegahan di Kota Bengkulu," *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, vol. 9, no. 2, hal. 137–152, 2023, doi: 10.25299/jiap.2023.13518.
- [13] T. H. Simarmata dan M. Malik, "Efektivitas Konseling Klien Rawat Jalan Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung," *Jurnal Progress Administrasi Publik*, vol. 2, no. 1, hal. 20–29, 2022, doi: 10.37090/jpap.v2i1.544.